



Laporan

KINERJA 2025

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR dan ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro SDM Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan maupun yang seharusnya dicapai. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami menyadari penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi kedepan.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025 Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,80.

Pada Tahun 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah dilakukan pengukuran terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Pada Tahun 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi memiliki pagu efektif sebesar Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Secara umum, capaian Kinerja pada Tahun 2025 ini menunjukkan arah yang positif, capaian ini sekaligus menjadi fondasi untuk meningkatkan capaian di tahun 2026 dengan tetap mengedepankan prinsip efektif, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, maka disusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Renstra Setjen) KKP Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Setjen KKP.

Berdasarkan Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) indikator Kinerja yang diampu oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi yaitu: Indeks Rekomendasi Birokrasi (RB) KKP dan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup KKP.

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro SDM Aparatur dan Organisasi atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi ini Mengacu Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sampai dengan Tahun 2025.

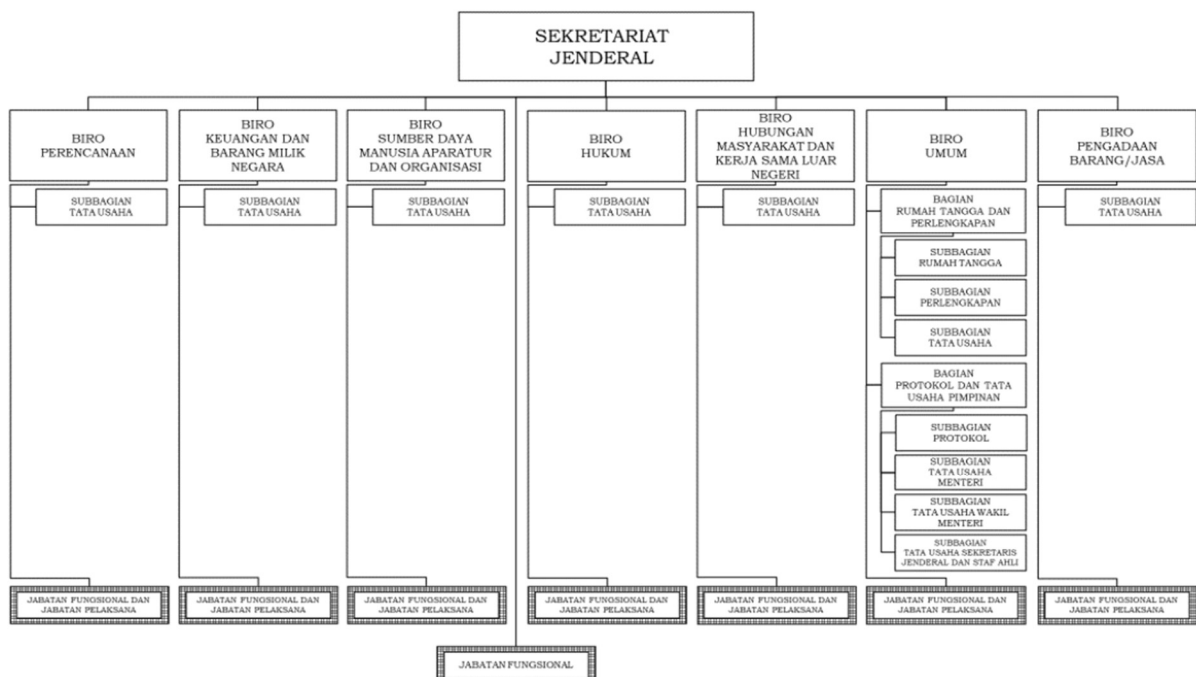
Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai Laporan atas Kinerja yang telah diperjanjikan Kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Organisasi, Tugas dan Fungsi

1. Susunan Organisasi dan tata Kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi sebagai salah satu unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



sumber : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,

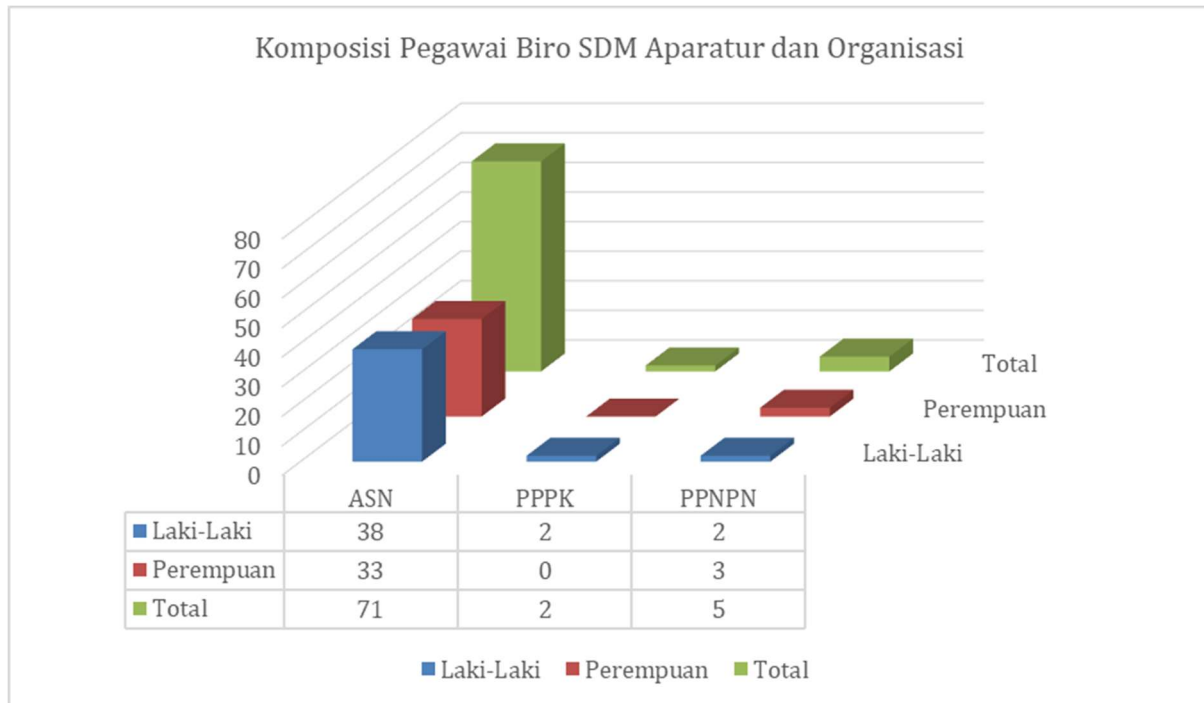
2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya untuk berkoordinasi dan mengelola sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan, manajemen talenta, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan koordinasi alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai aparatur sipil negara;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara;
- f. penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- g. penyiapan koordinasi, fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- h. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Terkait dengan Sumber Daya Manusia pada Bulan November terdapat 1 (satu) orang pegawai yang memasuki masa purna bakti yang dimana hal tersebut merubah jumlah pegawai aktif di Biro SDM Aparatur dan Organisasi yang semula berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang menjadi 78 (tujuh puluh delapan) orang pegawai, yang terdiri dari 42 (enam puluh dua) orang laki-laki

dan 36 (tiga puluh tujuh) orang perempuan, dengan rincian 72 (tujuh puluh dua) orang ASN, 2 (dua) orang PPPK, dan 5 (lima) orang PPNP.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi per 01 Desember 2025

3. Potensi dan Tantangan

Biro SDM Aparatur dan Organisasi memiliki berbagai potensi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

- 1) komitmen pimpinan dan aparatur yang tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) ketersediaan SDM yang andal;
- 3) sarana prasarana kerja yang memadai;
- 4) dasar hukum yang kuat;
- 5) sistem kerja berbasis teknologi informasi yang menunjang efektivitas kerja;
- 6) perencanaan program dan anggaran yang berkualitas;
- 7) pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten; dan
- 8) informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan kinerja, seperti keterbatasan dalam pemerataan pelatihan pegawai untuk mendukung profesionalisme ASN, kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dengan dinamika beban kerja, SDM dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis digital serta adanya efisiensi anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur. Sasaran kegiatan tersebut ditetapkan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun berjalan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target capaian yang terukur dan realistis, serta diupayakan untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Hal ini dilaksanakan sejalan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Setiap tujuan dalam Renstra disertai dengan indikator yang terukur guna menjamin konsistensi dan kesinambungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran Kegiatan Biro SDM Aparatur dan Organisasi untuk tahun 2025 adalah tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang pengelolaan SDM Aparatur.

1. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja dan target kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Terdapat 2 Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 19 indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan indikator Kinerja dan Target IK
Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA		TARGET
Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan SDM Aparatur	1	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Setjen (nilai)	86
	2	Nilai Sistem Merit KKP (nilai)	394
	3	Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)	82
	4	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	85
	5	Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks)	72
	6	Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP (nilai)	80
	7	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP (%)	100
	8	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur	65
	9	Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat Nasional (nilai)	5
	10	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)	5
	11	Persentase BerAKHLAK KKP (%)	70
	12	Persentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (%)	82
	13	Indeks Kepuasan Pelayanan SDM Aparatur dan Organisasi (indeks)	3

SASARAN KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO	14	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi	87
	15	Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi(%)	82
	16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi (%)	100
	17	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)	100
	18	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro SDMAO (%)	85
	19	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)	95

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 (rev. Desember 2025)

2. Program dan Kegiatan

Biro SDM Aparatur dan Organisasi melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal secara keseluruhan yaitu Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sedangkan program kerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian KKP. Tujuan kegiatan Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah

“Terwujudnya dukungan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional di lingkungan KKP”.

Biro SDM Aparatur dan Organisasi beberapa kegiatan yaitu: Pengelolaan SDM dan Organisasi yang dijabarkan dalam output sebagai berikut:

- a. Layanan Manajemen SDM; dan
- b. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.

adapun dukungan anggaran terhadap dua layanan utama pada Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan dua layanan pendukung berupa dukungan manajemen internal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Anggaran Layanan RO Biro SDM Aparatur dan Organisasi

No	Kode Anggaran	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	2323.EBA.960	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	45.812.000
2.	2323.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	302.778.000
3.	2323.EBA.962	Layanan Umum	1.063.853.000
4.	2323.EBA.994	Layanan Perkantoran	684.884.000
TOTAL			2.097.327.000

BAB III

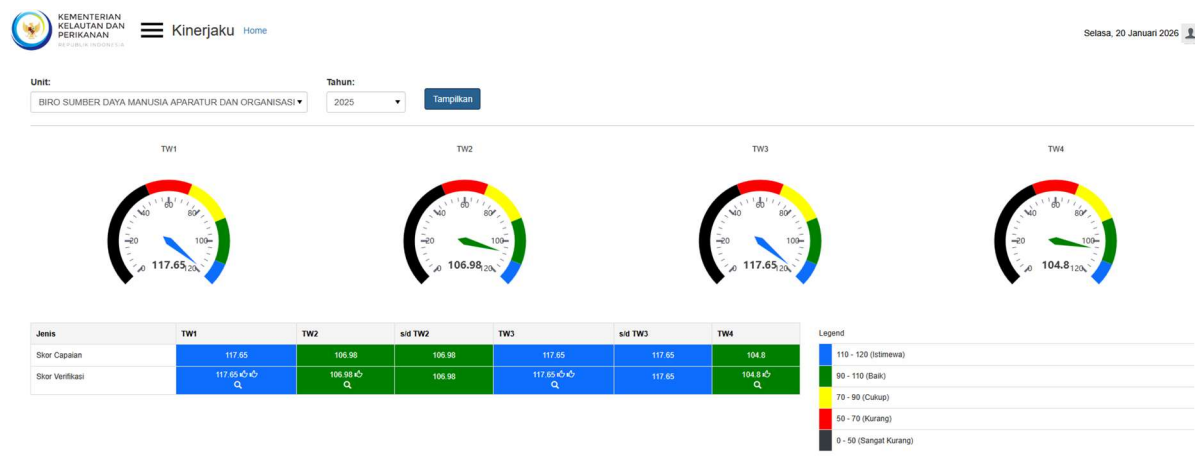
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

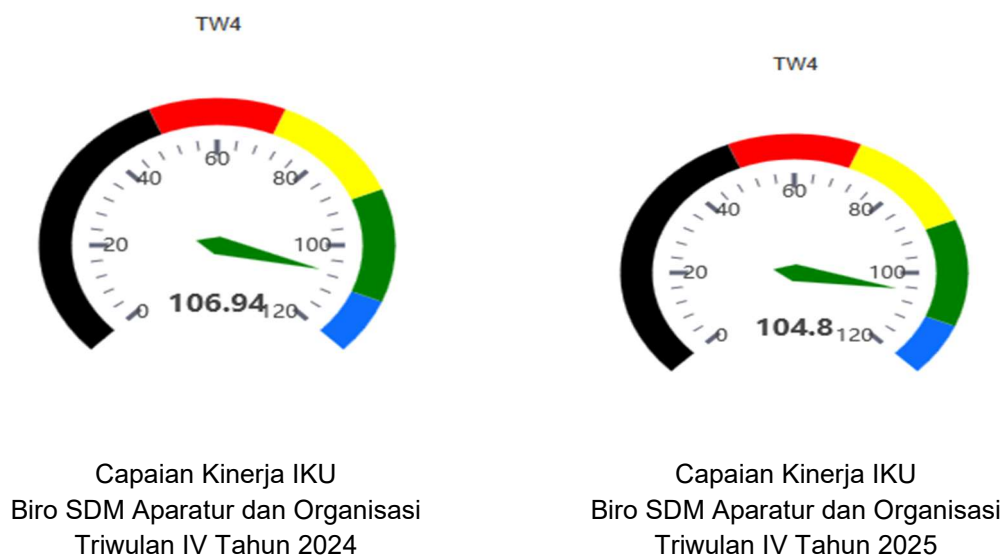
Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh tim di Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dengan didasarkan atas perjanjian kinerja telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), Secara umum Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro SDM Aparatur dan Organisasi untuk Tahun 2025 sebesar **104,80**.



Gambar 3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada aplikasi kinerjaku, sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja pada aplikasi kinerjaku Triwulan IV Tahun 2025 Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,80, capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 dengan nilai sebesar 120,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,35% dari tahun 2024. Hal tersebut terjadi dikarenakan untuk Tahun 2025 pengukuran capaian kinerja Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat Nasional dilakukan pada bulan Oktober 2025.



Gambar 4. Dashboard Capaian NKO TW IV TA 2024 dan TA 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Secara rinci capaian indikator kinerja utama di untuk Sasaran Strategis terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel 3.
Capaian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	URAIAN Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian
			Tahun 2025	TW IV/ Semester II		
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang Pengelolaan SDM Aparatur	1	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Setjen (nilai)	86	86	90,43	105,15
	2	Nilai Sistem Merit KKP (nilai)	394	394	398	101,02
	3	Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)	82	82	88,37	107,77

SASARAN KEGIATAN	URAIAN Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian
			Tahun 2025	TW IV/ Semester II		
	4	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	85	85	89,71	105,41
	5	Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks)	72	72	74	102,78
	6	Nilai Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi KKP (nilai)	80	80	84,86	106,08
	7	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP (%)	100	100	100	100
	8	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur (%)	65	65	65	100
	9	Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat Nasional (nilai)	5	5	5	100
	10	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)	5	5	5	100
	11	Persentase BerAKHLAK KKP (%)	70	70	78,7	112,43

SASARAN KEGIATAN	URAIAN Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian
			Tahun 2025	TW IV/ Semester II		
	12	Presentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (%)	82	82	82	100
	13	Indeks Kepuasan Pelayanan SDM Aparatur dan Organisasi (Indeks)	3	3	3,4	114,33
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO	14	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi	87	87	87	100
	15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi	82	82	90,58	110,46
	16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi (%)	100	100	100	100
	17	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)	100	100	100	100
	18	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro SDM	85	85	85	100

SASARAN KEGIATAN	URAIAN Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian
			Tahun 2025	TW IV/ Semester II		
		Aparatur dan Organisasi (%)				
	19	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)	95	95	99,98	105,24

Dalam mencapai Sasaran Kegiatan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah mengevaluasi dan menganalisis kinerja dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan.

Pada tahun 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi memiliki 2 sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama dengan capaian NKO sebesar 104,80

IK 1 : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Setjen

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025, Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal adalah Indikator yang dibentuk dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Mandatory sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal (Bobot 10);
2. Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Sekretariat Jenderal (Bobot 10);

3. Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (Bobot 10);
4. IKPA Sekretariat Jenderal (Bobot 10);
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Bobot 10);
6. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Sekretariat Jenderal (Bobot 10);
7. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal (Bobot 10);
8. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Jenderal (Bobot 10);
9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Sekretariat Jenderal (Bobot 5);
10. Nilai Pembangunan Integritas Sekretariat Jenderal (Bobot 5);
11. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang Sekretariat Jenderal (Bobot 5); dan
12. Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP Sekretariat Jenderal (Bobot 5).

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 140/SJ.3/OT.720/I/2026, tanggal 23 Januari 2026, Hal: Perbaikan Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025, Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 adalah sebesar 90.62 dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SETJEN	10	0-100	100	100.00	10.00
2	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK SETJEN	10	100-0	100	99.77	9.98

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
3	Nilai PM SAKIP SETJEN	10	0-100	100	89.60	8.96
4	IKPA SETJEN	10	0-100	100	95.58	9.56
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SETJEN	10	0-100	100	91.50	9.15
6	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP SETJEN	10	1-5	5	3.77	7.54
7	Indeks Profesionalitas ASN SETJEN	10	0-100	100	88.37	8.84
8	Nilai pengawasan kearsipan internal SETJEN	10	0-100	100	99.10	9.91
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	5	0-100	100	91.19	4.56
1	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	5	0-100	100	77.51	3.88
1	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	5	0-100	100	100.00	5.00
1	Persentase penyelesaian proses	5	0-100	100	65.00	3.25

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
	bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)					
Nilai Implementasi RB SETJEN						90.62

Pada tahun 2025, target capain Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Jenderal adalah sebesar 86,00.

Tabel 5.
Capaian Indikator Kinerja 1

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 1		Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi KKP (nilai)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan	Target	% Capaian terhadap Target	Target	% Capaian terhadap Target	
					TW IV 2025	TW IV 2025	TW IV 2025	2024-2025	2025	terhadap Target TW IV 2025	2025	terhadap Target 2025	
				90,43	86	90,43	105,15	-	86	105,15	88	-	

Upaya kedepan di triwulan IV atau semester II ini untuk capaian RB Setjen sebesar 90,43 dari target sebesar 86.00 sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 87/SJ.3/OT.720/I/2026 tanggal 13 Januari 2026, dengan kata lain capain yang di peroleh telah melebihi target RB Setjen untuk tahun 2025.

**CAPAIAN TARGET NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL**

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit es 1)	10	0-100	100	100.00	10.00
2.	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit es 1)	10	100-0	100	99.77	9.98
3.	Nilai PM SAKIP (unit es 1)	10	0-100	100	89.60	8.96
4.	IKPA (unit es 1)	10	0-100	100	95.58	9.56
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit es 1)	10	0-100	100	91.50	9.15
6.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit es 1)	10	1-5	5	3.67	7.35
7.	Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)	10	0-100	100	88.37	8.84
8.	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit es 1)	10	0-100	100	99.10	9.91
9.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	5	0-100	100	91.19	4.56
10.	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	5	0-100	100	77.51	3.88
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	5	0-100	100	100.00	5.00
12.	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)	5	0-100	100	65.00	3.25
Nilai Implementasi RB SETJEN						90.43

Sumber. Nota Dinas Biro SDMAO Nomor 87/SJ.3/OT.720/II/2026 tanggal 13 Januari 2026, Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025

IK 2 : Nilai Sistem Merit KKP

Persentase Penerapan sistem merit merupakan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang transparan dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan kinerjanya. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Tujuan sistem merit ini untuk:

1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;
2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;
3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;
4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme).

Penerapan sistem merit ini akan menghapus praktik-praktik ketidakadilan mulai dari tahap perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan (rekrutmen), pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan disiplin, pengembangan karir, hingga pemberian imbalan berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pensiun, dan jaminan hari tua. Untuk mengetahui tingkat maturitas (kematangan) instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit, ditetapkan alat ukur berupa Indeks Sistem Merit. Dalam Permen PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, bahwa aspek penilaian dalam penerapan sistem merit meliputi: perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. Hasil penilaian akan dikelompokkan dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai dengan sebutan “kategori I” untuk indeks 0 – 0,4 sampai dengan “kategori IV” (sangat baik) dengan indeks 0,8– 1. Pada Tahun 2025 ini, target capaian nilai untuk sistem merit sama besarnya seperti tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 394.

Tabel 6.
Capaian Indikator Kinerja 2

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 2		Indeks Penerapan Sistem Merit (nilai)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaikan 2024- 2025	Targe t 2025	% Capai an terhad ap Targe t TW III 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
0,95	0,95	0,96	0,96	398	394	398	101,02	-	394	301,02	394	-	

Penerapan sistem merit pada KKP secara kuantitas proses bisnis telah efektif dan diselenggarakan dengan berprinsip pada keberlanjutan dan komitmen yang tinggi dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penilaian LKE, penerapan sistem merit KKP tahun 2025 termasuk sebutan sangat baik, kategori IV, dan indeks 0,81 dengan nilai sebesar 398, karena sudah memenuhi sebagian besar dari aspek-aspek prinsip merit dalam manajemen ASN

Dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penerapan sistem merit, dibutuhkan pengembangan dan penguatan implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, KKP dan SDM perlu meningkatkan agility dan kemampuan adaptif untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional dan global

IK 3 : Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. IKU-1. Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru di tahun 2019 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu:

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin.

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - 2. Pejabat Struktural wajib sudah pernah melaksanakan Diklat Pim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - 3. Pejabat Fungsional wajib sudah pernah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20JP secara proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - 4. Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Kinerja BKN pada aplikasi SIASN hasil pengolahan dari Aplikasi Kinerja BKN dengan pengambilan Predikat Kinerja;
- d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1(satu) tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG; dan
- d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/ pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi selaku penanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data 4 (empat) dimensi terhadap pelaksanaan pengukuran IP ASN pegawai di lingkup Sekretariat Jenderal. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 memiliki target indeks sebesar 82 sedangkan di tahun 2024 memiliki target indeks sebesar 80 dengan realisasi indeks sebesar 85.

Tabel 7.
Capaian Indikator Kinerja 3

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 3		Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025				
2021	2022	2023	2024	2025	Targe t TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaia n TW IV 2025	% kenaik an 2024- 2025	Tar get 202 5	% Capaian terhadap Target TW IV 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
81,36 %	82,90 %	83,31	87,05	88,37	82,00	88,37	107,77	-	82	107,77	84	-	

Capaian IKU IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, sebesar 88,37 (kategori Tinggi) terdiri dari kualifikasi 22,71, kompetensi 34,47, kinerja 26,18; dan disiplin 5. Target sebesar 82 (kategori Tinggi), sehingga prosentase capaian sebesar 107,77% (melebihi target).

← → ↺

🔒 Not Secure

http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/eselon

📄

80%

☆

⬇️

👤 Sign in

🔗

≡



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja...

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	547	22.71	90.84 %	34.47	86.17 %	26.18	87.27 %	5	100 %	88.37	TINGGI
2	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	126	23.1	92.4 %	31	77.5 %	25.04	83.47 %	5	100 %	84.13	TINGGI
3	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	581	22.49	89.96 %	33.16	82.9 %	26.2	87.33 %	4.99	99.8 %	86.84	TINGGI
4	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1581	22.7	90.8 %	33.59	83.98 %	26.76	89.2 %	4.99	99.8 %	88.04	TINGGI
5	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1195	22.18	88.72 %	31.52	78.8 %	25.68	85.6 %	5	100 %	84.37	TINGGI
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	403	23.45	93.8 %	33.46	83.65 %	25.22	84.07 %	5	100 %	87.13	TINGGI
7	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1496	22.84	91.36 %	32.24	80.6 %	25.1	83.67 %	4.99	99.8 %	85.17	TINGGI
8	INSPEKTORAT JENDERAL	195	22.59	90.36 %	34.68	86.7 %	25.15	83.83 %	5	100 %	87.42	TINGGI
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4862	22.54	90.16 %	32.87	82.17 %	25.2	84 %	4.99	99.8 %	85.61	TINGGI
10	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	901	22.85	91.4 %	33.01	82.52 %	25.1	83.67 %	4.98	99.6 %	85.94	TINGGI

Gambar 5. Dashboard Capaian IPASN Lingkup Setjen Tahun 2025 pada aplikasi IP ASN, sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/eselon>

IK 4 : Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan KKP

Dalam Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dapat menggunakan sistem aplikasi. Sistem aplikasi dikelola dan dikembangkan BKN untuk pengolahan hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN.

Untuk melakukan penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, Setelah dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, Nilai merupakan nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Kategori ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Nilai Indeks dengan jumlah antara 81-100 diberi kategori A.
- 2) Nilai Indeks dengan jumlah antara 61-80 diberi kategori B.
- 3) Nilai Indeks dengan jumlah antara 41-60 diberi kategori C.
- 4) Nilai Indeks dengan jumlah antara 21-40 diberi kategori D.
- 5) Nilai Indeks dengan jumlah antara 0-20 dengan diberi kategori E.

Pada tahun 2025 ini, target nilai Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) adalah sebesar 85, meningkat dari pada target tahun sebelumnya yaitu sebesar 85.

Tabel 8.
Capaian Indikator Kinerja 4

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 4		Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan KKP											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaikan 2024- 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target TW IV 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
-	-	85	89,71	89,71	85	89,71	105,54	-	85	105,54	89	-	

Telah dilaksanakan koordinasi melalui rapat-rapat untuk mendorong pelaksanaan kegiatan yang menjadi catatan dan rekomendasi di tahun 2023.

1. Pada tanggal 23 Juli 2024 melalui Undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor B.2800/SJ.3/TU.330/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 pelaksanaan monev Implementasi NSPK Manajemen ASN di lingkungan KKP sekaligus Sosialisasi aplikasi I-MUT dengan mengundang Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara.

2. Pada tanggal 14 Oktober 2024 Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi menyampaikan Nota Dinas Kepada Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Badan dan Para Ketua Tim Kerja Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nota Dinas Nomor: 1810/SJ.3/TU.210/X/2024 Hal Permohonan Dokumen Pendukung Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2024.

3. Pada tanggal 13 November 2024 melalui Undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor B.4853/SJ.3/TU.330/XI/2024 tanggal 12 November 2024 Hal Undangan Rapat dengan Agenda Pemaparan dan Penyampaian Dokumen Pendukung Penilaian NSPK Manajemen ASN 2024.

Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9436/B-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Nilai Indeks 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul.

IK 5 : Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional KKP

Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Tim Kerja Peningkatan Utilitas Jabatan Fungsional menjelaskan tentang capaian Indeks Kinerja Utama serta kendala yang dihadapi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian target pada tahun 2025. Dalam bagian ini menjelaskan capaian Indeks Kinerja Utama Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembinaan jabatan fungsional dalam rangka upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan fungsional yang meliputi pelaksanaan tugas jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Fungsional. Dalam pengukuran pelaksanaan IKU ini berdasarkan kualitas pembinaan Jabatan Fungsional berdasarkan pada Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024, target nilai yang ditetapkan adalah 71 dan realisasinya sebesar 71 sedangkan pada tahun 2025 ini memiliki target sebesar 72.

Tabel 9.
Capaian Indikator Kinerja 5

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 5		Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024- 2025	Tar get	% Capaian terhadap Target	Target	% Capaian terhadap Target	
					TW IV 2025	TW IV 2025	TW IV 2025	2024- 2025	202 5	TW VI 2025			
-	-	74	74	74	72	74	102,78	-	72	102,78	76	-	

Indeks pembinaan jabatan fungsional sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja dan mengukur pencapaian tujuan strategis dan merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam memuat informasi mengenai capaian Indeks Kinerja Utama serta kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Pada bagian ini disajikan

capaian Indeks dan analisis capaian IK Pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembinaan Jabatan Fungsional dilaksanakan sebagai upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi, yang mencakup pelaksanaan tugas jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Fungsional. Pengukuran capaian IK tersebut dilakukan berdasarkan kualitas pembinaan Jabatan Fungsional yang berpedoman pada ketentuan pembinaan Jabatan Fungsional serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2025, target nilai yang ditetapkan adalah 72 dan realisasinya sebesar 74 yang termasuk dalam Kategori Cenderung Optimal yang diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu pembinaan profesionalitas jabatan fungsional, pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional dan pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.

IK 6 : Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Proses membandingkan unsur standar penilaian yang telah ditetapkan dengan fakta dan bukti data dukung yang dimiliki penyelenggara penilaian kompetensi. Untuk melakukan Penilaian dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN menggunakan formulasi penghitungan Nilai Akreditasi (Penilaian dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019, Setelah dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Nilai Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi, Nilai merupakan Pengakuan kelayakan yang dilakukan melalui penetapan kategori kelayakan berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian.

Kategori ditetapkan sebagai berikut:

- 1) pengakuan kelayakan kategori A dengan rentang nilai antara 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) sampai dengan 100 (seratus);
- 2) pengakuan kelayakan kategori B untuk rentang nilai antara 62,0 (enam puluh dua koma nol) sampai dengan 88,0 (delapan puluh delapan koma nol);
- 3) pengakuan kelayakan kategori C untuk rentang nilai antara 41,9 (empat puluh satu koma sembilan) sampai dengan 61,9 (enam puluh satu koma sembilan);

4) pengakuan kelayakan kategori D nilai di bawah 41,9 (empat puluh satu koma sembilan).

Target nilai untuk IK Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada tahun 2025 adalah sebesar 80.

Tabel 10.
Capaian Indikator Kinerja 6

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 6		Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi (nilai)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaikan 2024- 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target TW IV 2025	Target t 2029	% Capaian terhadap Target 2025	
-	-	80,01	-	84,86	80	84,86	106,08	-	80	106,08	84	-	

Pada Triwulan IV ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait Pengembangan Kompetensi yaitu: 1. Penkom JP Roren; 2. Penkom Pemetaan Pegawai Bulan November 2025; 3. Penkom Teknis Level 1-3 Periode II; 4. Penkom JF Non KP; 5. Penkom Seleksi Kelayakan TB; 6. Penkom JPT Pratama; 7. Penkom JF Madya Bid. KP Bulan November 2025; 8. Profiling ASN_BKN; 9. Penkom JM BPPMHKP, DJPK dan DJPB; 10. Penkom JF Madya PSDKP, PSDKP & DJPK; 11. Penkom MAT Bulan Desember 2025.

IK 7 : Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP

Penyederhanaan birokrasi dua level merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato 14 Juli 2019 dan 20 Oktober 2019. Presiden mengarahkan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Oleh karena itu, Penyederhanaan birokrasi dua level menjadi hal yang mendesak dilakukan.

Dengan struktur yang disederhanakan, diharapkan kinerja birokrasi lebih efisien dan efektif. Kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi memberi peluang bagi jabatan fungsional memberikan dukungan terhadap kualitas ASN, mempercepat pengambilan keputusan bagi pimpinan, langkah untuk mempercepat proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang, dan tercapainya tujuan organisasi (K/L) lebih efisien dan efektif. IKU Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP pada tahun 2025 ini memiliki target nilai yang sama seperti pada tahun sebelumnya.

Tabel 11.
Capaian Indikator Kinerja 7

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 7		Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP (Persentase)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaikan 2024- 2025	Tar get 202 5	% Capaian terhadap Target TW III 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
-	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-	

Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian terhadap penyederhanaan struktur organisasi. Oleh karena itu, capaian pada tahun 2025 mengacu pada hasil penilaian tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam surat dari Kemenpan RB Nomor B/213/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

IK 8 : Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur

Proses Bisnis (probis) merupakan Kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis KKP terdiri atas :

- a. Probis Level 0;

- b. Probis Level 1;
- c. Probis Level 2; dan
- d. Probis Level 3.

Penyusunan SOP berdasarkan Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

IK Proses Bisnis KKP belum memiliki target dikarenakan IK Probis baru di input pada tahun 2025.

Tabel 12.
Capaian Indikator Kinerja 8

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 8		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur (Persentase)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-20294				
2021	2022	2023	2024	2025	Targe t TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaika n 2024- 2025	Tar get 202 5	% Capaian terhadap Target TW IV 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target 2025	
-	-	-	-	65	65	65	100	-	65	100	85	-	

Pada triwulan IV atau Semester II Capaian Indikator Kinerja Mandatory Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 sebesar 65% dari target 65% atau dengan kata lain memenuhi target kinerja.

IK 9 : Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat Nasional

Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta memberikan karya terbaik kepada bangsa dan negara. Pemberian penghargaan salah

satu langkah menumbuhkan kebanggaan, keteladanan, kepatriotan, sikap kepahlawanan dan semangat kejuangan kepada dan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Penghargaan merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni berupa pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Tujuan penyelenggaraan pemberian penghargaan/tanda jasa/kehormatan adalah sebagai suatu penghargaan dan pengakuan dari negara kepada seseorang, kesatuan maupun organisasi atas jasa-jasa dan darma baktinya terhadap bangsa dan negara, untuk memberikan dorongan yang kuat guna memelihara kesetiaan, kebanggaan, peningkatan prestasi serta semangat bekerja dan semangat kepahlawanan, dan sebagai teladan bagi yang lain untuk berbuat dan berperilaku yang sama terhadap bangsa dan negara. IKU Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional pada tahun 2025 memiliki target sebanyak 5 Penetapan.

Tabel 13.
Capaian Indikator Kinerja 9

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 9		Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan Perikanan tingkat nasional (kategori)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024- 2025	Target	% Capaian terhadap Target	Target	% Capaian terhadap Target	
					TW IV 2025	TW IV 2025	TW III 2025		2025	Target TW IV 2025	2025	2025	
3	3	4	7	5	5	5	100	-	5	100	5	-	

Dasar Hukum pengelolaan Penghargaan ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. UU Nomor 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang GTK
4. Pedoman Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau Pemakaian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sesuai Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Penghargaan ASN dengan target 5, berupa pelaksanaan penghargaanannya sebagai berikut:

- 1) Satyalancana Karya Satya XXX
- 2) Satyalancana Karya Satya XX
- 3) Satyalancana Karya Satya X
- 4) Satyalancana Wira Karya
- 5) Penghargaan Inovasi Bidang Kelautan dan Perikanan

A. Penghargaan ASN Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X Tahun

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengirimkan usulan SLKS X, XX, XXX Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor R.490/MEN-KP/IV/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebanyak 1.569 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a) Satyalancana Karya Satya XXX Tahun = 90 orang
- b) Satyalancana Karya Satya XX Tahun = 797 orang
- c) Satyalancana Karya Satya X Tahun = 682 orang

Proses pengusulan Satyalancana Karya Satya (SLKS) dilakukan melalui proses seleksi administrasi dengan sistem informasi usulan SLKS di lingkungan KKP, pada laman <https://layanan-gmb.sdmao.id/login>, dengan pengelola terdiri dari admin KKP, admin eselon I dan admin unit kerja, dengan berbasis database aplikasi e-Pegawai KKP.

Proses usulan dari KKP di tindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TK/Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan Surat Sekretaris Militer Presiden Nomor R.152/KSN/SM/GT.00.01/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Surat Usul Tanda Kehormatan Satyalancana, Evaluasi

Penghargaan ASN SLKS 2025 KKP yaitu dari usulan sebanyak 1.569 orang PNS, memenuhi syarat 1.562 orang PNS, tidak memenuhi syarat 7 orang PNS (2 orang masa kerja kurang, 1 orang sedang menjalani hukuman disiplin, 1 orang belum memiliki SLKS tahun sebelumnya, 2 orang telah diberikan SLKS diatasnya, dan 1 orang telah dianugerahkan sebagaimana diusulkan), dan sebanyak 1.562 orang PNS disematkan penghargaan SLKS yang dilaksanakan pada HUT Republik Indonesia 17 Agustus 2025.

B. Penghargaan ASN Satyalancana Wira Karya

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengirimkan usulan penerima Satyalancana Wira Karya Tahun 2025 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor R.489/MEN-KP/IV/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ditjen Perikanan Tangkap = 2 orang
- 2) Ditjen Perikanan Budidaya = 6 orang
- 3) BPPSDM = 5 orang

Proses pengusulan Satyalancana Wira Karya dilakukan melalui proses seleksi administrasi dan penilaian tim penilai Wira Karya dengan melibatkan Pejabat Fungsional Utama bidang Kelautan dan Perikanan, tim Sekretariat Unit Eselon I dan Biro SDMAO, sesuai dengan inovasi bidang Kelautan dan Perikanan pengusul yang telah teruji dan memberi manfaat yang luas bagi mitra dan stakeholder serta berkelanjutan.

Proses usulan dari KKP di tindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/TK/Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, yaitu dari usulan sebanyak 13 orang PNS, terpilih 10 orang PNS yang mendapatkan Penghargaan, penempatan Wira Karya dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025 dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, di dampingi oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, serta di saksikan oleh Pejabat Eselon I dan II dan tamu undangan.

C. Penghargaan ASN Inovasi Bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka memperingati Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dengan thema “26 Tahun Bersama KKP: Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan, Wujudkan

Indonesia Emas”, maka Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mengeluarkan Surat Nota Dinas Nomor 1705/SJ.3/KP.50/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Partisipasi Pegawai dalam Lomba Karya Tulis Inovasi pada HUT ke 26 KKP Tahun 2025. Penyelenggaraan bertujuan untuk mendorong budaya inovasi dan pemikiran strategis kepada seluruh pegawai KKP dengan 2 pilihan tema yakni Model Bisnis Kampung Nelayan Merah Putih dan Swasembada Garam.

Hasil seleksi terpilih 2 orang ASN yaitu Joko Purnomo, NIP 198103172005021001, Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP, judul inovasi “Strategi Optimalisasi Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya (bergerak, Responsif dan dampak nyata) menuju bursa ikan dunia” dan Dani Saepuloh, NIP 198505272010121002, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP, judul inovasi “ Transformasi Digital Usaha Garam Rakyat: Model *Smart Farming* yang Diperkaya *Knowledge Management System* untuk Produksi Presisi dan Rantai Pasok Transparan”.

IK 10 : Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP pada tanggal 16 Februari 2023.

Penyederhanaan birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan Sistem Kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi Sistem Kerja yang semula berjenjang dan terkotak-kotak (silo) sehingga mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan yang berubah menjadi Sistem Kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi Sistem Kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata

kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama. Target Capaian IK penyederhanaan Birokrasi KKP pada tahun 2025 ialah 5, sama seperti target pada tahun sebelumnya.

Tabel 14.
Capaian Indikator Kinerja 10

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 10		Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Tar get TW IV 202 5	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaik an 2024- 2025	Tar get 202 5	% Capaian terhadap Target TW III 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target 2025	
-	-	5	5	5	5	5	100	-	5	100	5	-	

IK 11 : Persentase BerAKHLAK Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pelayan masyarakat publik khususnya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta untuk menuju Aparatur Sipil Negara bertaraf internasional, dibutuhkan transformasi sumber daya manusia dimana salah satunya adalah menggunakan Nilai-nilai Utama (Core Values) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang telah secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mencapai penerapan persentase BerAKHLAK.

Kategori dari persentase BerAKHLAK yaitu Predikat A (Sehat, range indeks 75%-100%, Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut), Predikat B (Cukup Sehat, range indeks 50%-74,9%, Pegawai sudah mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik), Predikat C (Tidak Sehat, range 25%-49,9%, Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari), dan Predikat D (Sangat Tidak Sehat, range 0%-24,9%, Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari).

Core Values BerAKHLAK dan *Employer Branding* menjadi pedoman dalam mengetahui, memahami, mengimplementasikan, menginternalisasikan dan melaksanakan Perwujudan Perilaku ASN KKP Dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK agar dapat membentuk budaya kerja, mengubah pola pikir pegawai dan menjadikan perilaku keseharian ASN KKP untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan Organisasi. Pada Tahun 2023, IKU BerAKHLAK menjadi satu-satunya IKU yang targetnya tidak tercapai yang ada di Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Pada Tahun 2025 ini target nilai IKU BerAKHLAK yaitu 70.

Tabel 15.
Capaian Indikator Kinerja 11

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 11		Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target TW III 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target 2025	
-	-	62,50	78,7	-	70	78,7	112,43	-	70	112,43	92	-	

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yang dilaksanakan pada tahun 2024, diperoleh indeks BerAKHLAK sebesar 78,7% (Sehat).

IK 12 : Persentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah

Sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap instansi pemerintah wajib Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan diangkat kedalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor B/528/M.SM.01.00/2018, tanggal 15 Oktober 2018 perihal mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang menyatakan bahwa K/L/Pemda yang mempunyai rencana mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2025, target capaian IKU Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah nilainya masih sama seperti tahun 2024, yaitu 82.

Tabel 16.
Capaian Indikator Kinerja 12

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 12		Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (Persentase)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaika n 2024- 2025	Tar get 202 5	% Capaian terhadap Target TW IV 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2025	
-	-	81	82,3 0	82	82	82	100	-	82	100	92	-	

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. surat usulan dari pemerintah daerah yang masuk sejumlah 54 (lima puluh empat) surat;
2. dari 54 (lima puluh empat) surat usulan tersebut, 53 (lima puluh tiga) usulan sudah dilakukan verifikasi dan validasi serta diberikan rekomendasi; dan
3. untuk 1 (satu) usulan yaitu dari provinsi Jawa Timur belum dilakukan verifikasi dan validasi serta diberikan rekomendasi karena salah satu unit pembina Jabatan Fungsional tidak berkenan melakukan verifikasi dan validasi serta memberikan rekomendasi.

Memperhatikan target tahun 2025 sebesar 82 (delapan puluh dua), maka Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Pemerintah Daerah telah memenuhi target kinerja.

IK 13 : Indeks Kepuasan Pelayanan SDM Aparatur dan Organisasi

Indeks Layanan Kepegawaian merupakan penilaian atas layanan kepegawaian yang diberikan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada seluruh unit kerja baik pusat maupun UPT pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tujuan dari layana tersebut yaitu:

1. Menilai kualitas, kecepatan, serta tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu pelayanan Biro SDMAO; dan
3. Mendukung upaya simplifikasi layanan berbasis data survei yang akurat dan terukur.

Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada pengelola kepegawaian dan pegawai pada unit organisasi baik pusat maupun UPT pada unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan pengukuran ini berada di bawah tanggung jawab Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi selaku pembina bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target capaian IK Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan SDM Aparatur dan Organisasi dengan indeks 3 dan dinilai pada akhir Tahun.

Tabel 17.
Capaian Indikator Kinerja 13

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 13		Presentase Penyelesaian Usul Mutasi Kepegawaian											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaikan 2025- 2029	Tar get 202 5	% Capaian terhadap Target TW IV 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2025	
-	-	-	-	3	3	3,43	114,33	-	3	114,33	4	-	

Pelaksanaan kegiatan survey kepuasan terhadap pelayanan SDM Aparatur dan Organisasi pada tanggal 10 Desember 2025 dengan melibatkan unit Eselon I dan UPT dengan kategori “Sangat Baik” dengan nilai rata-rata survei sebesar 3,43 atau 114,33%

IK 14 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Persentase Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi merupakan IKU yang menggantikan IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja. Adapun IK ini dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- perencanaan kinerja (30%);
- pengukuran kinerja (30%);
- pelaporan kinerja (15%); dan
- evaluasi kinerja (25%).

Target capaian nilai Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2025 adalah 87, mengalami kenaikan dari target tahun sebelumnya yaitu 84.

Tabel 18.
Capaian Indikator Kinerja 14

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi											
IKU 14		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2024-2025	Target	% Capaian terhadap Target	Target	% Capaian terhadap Target	
					TW IV 2025	TW IV 2025	TW IV 2025	2024-2025	2025	terhadap Target TW IV 2025	2025	2025	
-	-	84,70	82,20	87	87	87	100	-	87	100	87	-	

Sesuai dengan Surat Nomor B.937/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 16 September 2025 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025, untuk Target Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2025 sebesar 87 dengan kategori A (Memuaskan).

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	11.50	26.10
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	11.50	24.60
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	7.75	13.80
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	12.25	22.50
	TOTAL	100.00	43.00	87.00
	PREDIKAT		C	A

Gambar 5. LKE pada aplikasi Kinerjaku, sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

IK 15 : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM Aparatur

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

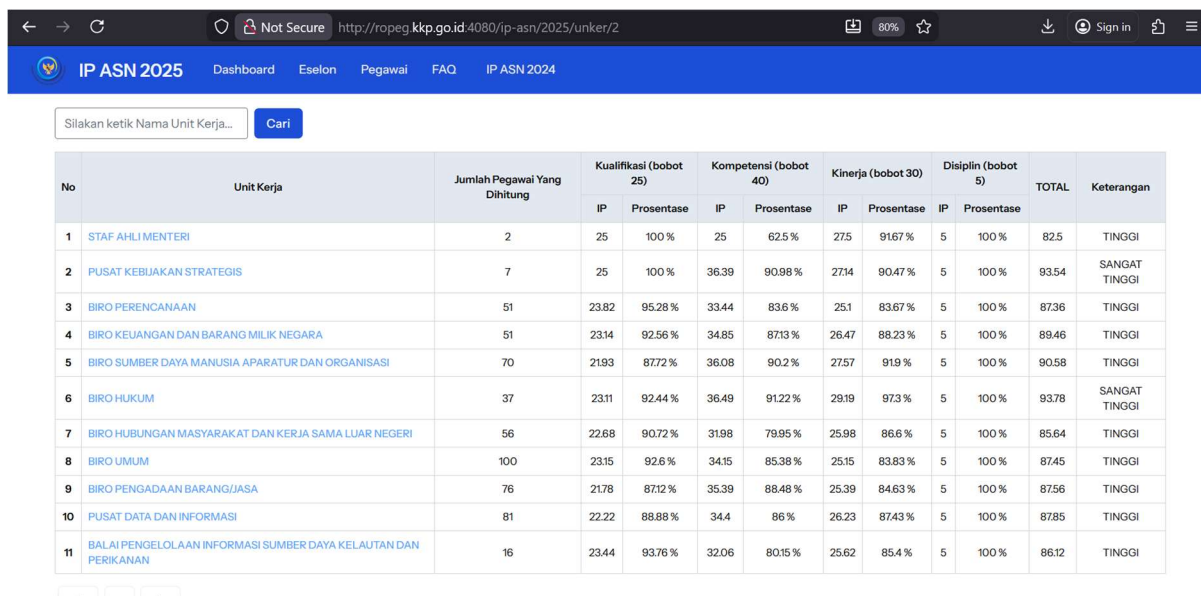
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali.

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi selaku penanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data 4 (empat) dimensi terhadap pelaksanaan pengukuran IP ASN pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil atas pengukuran IP ASN menjadi bahan pertimbangan, rekomendasi tindak lanjut untuk capaian output kendali tinggi sesuai target pada Perjanjian Kinerja atau Indikator Kinerja Utama Organisasi dan capaian output kendali rendah. Proses pembaruan kebijakan yang terus berkembang juga menjadi alasan evaluasi berperan penting untuk pertimbangan dalam berbagai tindak lanjut terhadap kompetensi pegawai dan dampaknya pada proses pengukuran profesionalitas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, laporan monitoring dan evaluasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi dalam mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi, serta capaian pengukuran IP ASN pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2025 ini, target capaian nilai IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah sebesar 87.

Tabel 19.
Capaian Indikator Kinerja 15

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 15		Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM Aparatur(%)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaika n 2024- 2025	Targe t 2025	% Capaia n terhad ap Target TW IV 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
100	95,00	100	89,76	90,58	82	90,58	110,46	-	82	110,46	-	-	

Pada triwulan IV atau semester II ini capain IP ASN Lingkup Biro SDM Aparatur dan Otganisasi sebesar 90,58 dari target sebesar 82,00, hal tersebut tidak terlepas dari keikutsertaan seluruh pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengikuti pelatihan, seminar, *e-learning* yang diselenggarakan baik dari internal KKP maupun dari K/L lainnya. Penghitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN didukung dengan dashboard yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN sehingga validitas datanya lebih terjamin.



The screenshot shows a web browser interface for the 'IP ASN 2025' dashboard. The URL is <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/2>. The dashboard has a search bar and a table with 13 columns: No, Unit Kerja, Jumlah Pegawai Yang Dihitung, Kualifikasi (bobot 25) with sub-columns IP and Prosentase, Kompetensi (bobot 40) with sub-columns IP and Prosentase, Kinerja (bobot 30) with sub-columns IP and Prosentase, Disiplin (bobot 5) with sub-columns IP and Prosentase, TOTAL, and Keterangan. The table lists 11 units, with the highest total score being 93.78 for 'BIRO HUKUM' and the lowest being 82.5 for 'STAF AHLI MENTERI'.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	25	100 %	25	62.5 %	27.5	91.67 %	5	100 %	82.5	TINGGI
2	PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS	7	25	100 %	36.39	90.98 %	27.14	90.47 %	5	100 %	93.54	SANGAT TINGGI
3	BIRO PERENCANAAN	51	23.82	95.28 %	33.44	83.6 %	25.1	83.67 %	5	100 %	87.36	TINGGI
4	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	51	23.14	92.56 %	34.85	87.13 %	26.47	88.23 %	5	100 %	89.46	TINGGI
5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	70	21.93	87.72 %	36.08	90.2 %	27.57	91.9 %	5	100 %	90.58	TINGGI
6	BIRO HUKUM	37	23.11	92.44 %	36.49	91.22 %	29.19	97.3 %	5	100 %	93.78	SANGAT TINGGI
7	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	56	22.68	90.72 %	31.98	79.95 %	25.98	86.6 %	5	100 %	85.64	TINGGI
8	BIRO UMUM	100	23.15	92.6 %	34.15	85.38 %	25.15	83.83 %	5	100 %	87.45	TINGGI
9	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	76	21.78	87.12 %	35.39	88.48 %	25.39	84.63 %	5	100 %	87.56	TINGGI
10	PUSAT DATA DAN INFORMASI	81	22.22	88.88 %	34.4	86 %	26.23	87.43 %	5	100 %	87.85	TINGGI
11	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	23.44	93.76 %	32.06	80.15 %	25.62	85.4 %	5	100 %	86.12	TINGGI

Gambar 5. Dashboard Capaian IP ASN Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 pada aplikasi IP ASN, sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/2>

IK 16 : Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan-undangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dimana dalam Permen KP tersebut Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menargetkan 2 (dua) buah Peraturan Menteri di tahun 2025 yaitu:

- a. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian JPT dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 21.
Capaian Indikator Kinerja 16

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 16		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi (%)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaik an 2024- 2025	Target 2025	% Capaian terhada p Target TW IV 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
-	90,91 %	100	100	100	100	100	100	-	100	100	-	-	

Target capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Pada triwulan II ini Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah menyelesaikan 2 (dua) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (100%) dan Rancangan Permen KP tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan KKP (proses harmonisasi di kementerian hukum).

IK 17 : Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Target Capaian IK mengenai Temuan BPK pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Tabel 22.
Capaian Indikator Kinerja 17

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 17		Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisa si TW IV 2025	% Capaian TW IV 2025	% kenaik an 2024- 2025	Target 2025	% Capaian terhadap Target TW IV 2025	Targe t 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	

Sebagaimana tertuang dalam Noda Dinas dari Biro Keuangan nomor 136/SJ.2/RC.610/I/2026 Hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal dimana dalam Nota Dinas tersebut disampaikan jbahwa penyelesaian temuan BPK untuk Biro SDM Aparatur dan Organisasi dengan capaian sebesar 100%.

No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Pusdatin	-	-	-	100
7	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	0	100
8	BPISDKP	-	-	-	100
9	TP	-	-	-	100
Total		1.885.275.241	1.885.275.241	0	100

IK 18 : Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mantra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Target capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Pada Tahun 2025 adalah sebesar 85%.

Tabel 23.
Capaian Indikator Kinerja 18

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi											
IK-18		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Biro SDMAO											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	Capaian% TW IV 2025	kenaikan % 2024- 2025	Targ et 2025	% Capaian terhad ap Target TW IV 2025	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029	
100	95,00	100	100	100	85	100	117,65	12,39	85	117,65	-	-	

Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" periode Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh sebesar 100% yaitu dari 89 rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 89 rekomendasi, dengan rincian per unit kerja eselon II sebagai berikut:

Tabel 24.

Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Biro HKLN	0	0	100%	0	0%
7	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
8	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
9	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
Total		89	89	100%	0	0

Sumber. Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 103/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 09 Januari 2026, Perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2026”

Sebagai bentuk komitmen Biro SDM Aparatur dan Organisasi dalam mempertahankan capaian kinerja IK ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan antar Ketua Tim Kerja dan para penanggung jawab kegiatan yang diharapkan dapat membuat kinerja di Biro SDM Aparatur dan Organisasi menjadi lebih baik dengan melakukan evaluasi dan perbaikan atas kegiatan yang sudah dilakukan.

IK 19 : Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja, Dan Merupakan Tekad Dan Janji Yang Akan Dicapai Antara Pimpinan Unit Kerja Yang Menerima Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja Dengan Pihak Yang Memberikan Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja. Target Capaian IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 95%.

Tabel 25.
Capaian Indikator Kinerja 19

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi											
IK 19		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)											
Realisasi					2025				Renstra Setjen 2025-2029				
2021	2022	2023	2024	2025	Tar get	Realisasi	% Capaian	% kenaikan	Tar get	% Capaian terhadap Target	Target 2029	% Capaian terhadap Target	
					TW IV	TW IV	TW IV	2024-2025	2025	Target TW IV		2025	
-	99,48	98,49	98,90	-	95	99,98	105,24	-	95	105,24	-	-	

Pada triwulan IV ini pagu efektif di Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengalami perubahan sebesar Rp158.999.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang semula sebesar Rp1.938.328.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang semula

Rp17.100.587.000,00. (Tujuh belas miliar seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPA awal Tahun 2025 menjadi Rp1.938.328.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Desember 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah mengirimkan Nota Dinas dengan Nomor 2105/SJ.3/RC.420/XII/2025 kepada Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Perencanaan telah melakukan usulan revisi anggaran (POK). Adapun mata anggaran yang mengalami revisi yaitu Layanan Umum (2328.EBA.962) dan Layanan Perkantoran (2328.EBA.994), dengan penambahan pagu sebesar Rp158.999.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan demikian pagu efektif di Biro SDM Aparatur dan Organisasi menjadi Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Tabel 26.

Pagu Anggaran Efektif setelah Revisi dan Relaksasi Tahun Anggaran
2025 Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2025

Pagu Efektif Sebelum Relaksasi (Rp)	Revisi (Rp)	Pagu Efektif setelah Revisi (Rp)	Relaksasi (Rp)	Pagu Efektif Setelah Relaksasi (Rp)
1.938.328.000	158.999.000	2.097.327.000	-	2.097.327.000

dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari total pagu sebesar Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan anggaran sebesar dengan sisa anggaran sebesar Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Tabel 27.
Realisasi Anggaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Triwulan IV Tahun 2025

No	Kode Anggaran	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	2323.EBA.960	Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	45.812.000	45.729.262	82.738	99,82
2.	2323.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	302.778.000	302.772.400	5.600	100,00
3.	2323.EBA.962	Layanan Umum	1.063.853.000	1.063.618.889	234.111	99,98
4.	2323.EBA.994	Layanan Perkantoran	684.884.000	684.729.088	154.912	99,98
TOTAL			2.097.327.000	2.096.849.639	477.361	99,98

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dalam perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap jajaran di lingkungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan seluruh *stakeholder*.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh makna, dimana seluruh jajaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra Setjen 2025-2029 dan juga tahun yang penuh dengan tantangan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk tetap menjaga pencapaian target kinerja di tengah keterbatasan ruang gerak dan ruang fiskal. Rencana Aksi di tahun 2025 yang telah disusun terus dilaksanakan dan dievaluasi berkala untuk tetap dapat mempertahankan prestasi kinerja organisasi. Di tahun 2025, banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan terkait kesekjenan antara lain: pembenahan tata kerja, pemanfaatan teknologi dan informasi, digitalisasi, inovasi-inovasi baru serta digital *awareness* bagi setiap pegawai/pejabat dalam menghadapi kondisi yang tidak terduga. Semua tahapan untuk pencapaian target kinerja dievaluasi bersama untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi agar kinerja tetap terjaga.

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi yang merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja dan beberapa penghargaan yang telah berhasil diraih/dipertahankan Biro SDM Aparatur dan Organisasi menjadi hasil dari kerja keras, dan dedikasi seluruh pegawai dalam rangka menjaga semangat mendukung pencapaian visi Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

1. Pada Triwulan IV 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian pada Triwulan IV 2025, Nilai Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah sebesar
2. Pada triwulan IV ini pagu efektif di Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengalami perubahan sebesar Rp158.999.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang semula sebesar Rp1.938.328.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Adapun Evaluasi atas capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan kedepan memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3 Akuntabilitas Kinerja keseluruhan indikator kinerja telah tercapai, namun untuk mempertahankan capaian IK di triwulan IV tahun 2025. Untuk mencapai target kinerja Triwulan IV atau Semester II Tahun 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi akan segera menerapkan serangkaian langkah perbaikan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian sebelumnya, optimalisasi proses kerja, peningkatan koordinasi antar tim, serta pengawasan rutin terhadap progres pelaksanaan kinerja.

Lampiran 1.

a. Perjanjian Kinerja Revisi (Pengesahan 02 Desember 2025)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dida Daniarsyah**

Jabatan : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi



Dida Daniarsyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi	1 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Setjen (nilai)	86
		2 Nilai Sistem Merit KKP (nilai)	394
		3 Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)	82
		4 Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN (indeks)	85
		5 Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional KKP (indeks)	72
		6 Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP (nilai)	80
		7 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP (%)	100
		8 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur Lingkup Setjen (%)	65
		9 Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional (nilai)	5
		10 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (nilai)	5
		11 Persentase BerAKHLAK KKP (%)	70
		12 Persentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (%)	82
		13 Indeks Kepuasan Pelayanan SDMA dan Organisasi (indeks)	3
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO	14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi (nilai)	87
		15 Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi (indeks)	82
		16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi (%)	100
		17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)	100
		18 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)	85
		19 Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Organisasi dan SDM	348.590.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	1.748.737.000
Total Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025		2.097.327.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro SDM Aparatur dan
Organisasi



Dida Daniarsyah

Lampiran RB

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 87/SJ.3/OT.720/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi
Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro Perencanaan, Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025, tanggal 18 Desember 2025, hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi Eselon I	Nilai Capaian
1.	Sekretariat Jenderal	90.43
2.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	88.71
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	87.80
4.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	88.04
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	88.71
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	90.59
7.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90.17
8.	Inspektorat Jenderal	88.50
9.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	90.63
10.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	88.50

Memperhatikan target tahun 2025 dengan nilai 86 (delapan puluh enam), maka capaian seluruh unit organisasi eselon I di lingkungan KKP telah **memenuhi target kinerja**.

Untuk rincian capaian target masing-masing unit organisasi eselon I sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**CAPAIAN TARGET NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL**

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit es 1)	10	0-100	100	100.00	10.00
2.	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit es 1)	10	100-0	100	99.77	9.98
3.	Nilai PM SAKIP (unit es 1)	10	0-100	100	89.60	8.96
4.	IKPA (unit es 1)	10	0-100	100	95.58	9.56
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit es 1)	10	0-100	100	91.50	9.15
6.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit es 1)	10	1-5	5	3.67	7.35
7.	Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)	10	0-100	100	88.37	8.84
8.	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit es 1)	10	0-100	100	99.10	9.91
9.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	5	0-100	100	91.19	4.56
10.	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	5	0-100	100	77.51	3.88
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	5	0-100	100	100.00	5.00
12.	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)	5	0-100	100	65.00	3.25
Nilai Implementasi RB SETJEN						90.43

Lampiran IK 3

IP ASN Lingkup Setjen

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.3/TU.140/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
4. Para Sekretaris Badan

Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Ralat Lampiran Nota Dinas Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026

Tanggal : 13 Januari 2026

Menyusuli Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan **ralat pada Lampiran angka 2**, Tabel Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran, **terdapat kesalahan penulisan angka pada Baris 1 Kolom 7 (Nilai Total Sekretariat Jenderal) yang semula 88,27 seharusnya 88,37 dan pada Baris 11 Kolom 7 (Nilai Total) yang semula 86,04 seharusnya 86,03.** Sebagai tindak lanjut terlampir tabel yang telah diperbaiki untuk digunakan sebagai dasar dokumentasi dan pelaporan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 86/SJ.3/TU.140/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	22,71	34,47	26,18	5	88,37
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	23,1	31	25,04	5	84,13
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	22,49	33,16	26,2	4,99	86,84
4	Ditjen Perikanan Tangkap	22,7	33,59	26,76	4,99	88,04
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	22,18	31,52	25,68	5	84,37
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	23,45	33,46	25,22	5	87,13
7	Ditjen PSDKP	22,84	32,24	25,1	4,99	85,17
8	Inspektorat Jenderal	22,59	34,68	25,15	5	87,42
9	BPPSDMKP	22,54	32,87	25,2	4,99	85,61
10	BPPMHKP	22,85	33,01	25,1	4,98	85,94
	Total	22,63	32,88	25,53	4,99	86,03 (Tinggi)



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Lampiran IK 4

NSPK



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id | Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 9436/B-AK.02.02/SD/K/2024 Jakarta, 19 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2023

Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Di
Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Menteri beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN disebutkan bahwa wasdal pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan melalui metode preventif yaitu antara lain dengan cara penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, dan melalui metode represif yaitu melalui Audit Manajemen ASN;
2. Selanjutnya kami mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan upaya perbaikan implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan hasil indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2022, sehingga mendapat predikat unggul;
3. Terhadap dokumen pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, kami telah melakukan verifikasi dan validasi data capaian dan mengintegrasikan hasilnya dengan data pengawasan dan pengendalian BKN, yang selanjutnya dapat kami sampaikan antara lain:
 - a. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan **Nilai Indeks 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul**;
 - b. Diperlukan konsistensi untuk peningkatan nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam Komitmen Bersama Peningkatan Kualitas Implementasi NSPK Manajemen ASN;
 - c. Terhadap komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKN senantiasa akan melakukan upaya pembinaan serta pengawasan dan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



pengendalian melalui unit kerja di BKN.

4. Sehubungan dengan hasil Pengawasan dan Pengendalian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 dimaksud, perlu kami sampaikan pula kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Instansi agar melakukan beberapa hal antara lain:
 - 1) Melakukan upaya perbaikan terhadap rekomendasi hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 sebagaimana catatan yang tertuang pada setiap elemen di aplikasi indeks NSPK;
 - 2) Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN;
 - 3) Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas implementasi Manajemen ASN Tahun 2024 yang sesuai dengan NSPK; dan
 - 4) Hasil perbaikan terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan pada Angka 1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.
 - b. Guna mendorong perbaikan dan peningkatan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKN akan mengupayakan pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat memberikan pendampingan atau pembimbingan dalam implementasi Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK berdasarkan peran, tugas, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.
5. Dapat kami sampaikan bahwa sejalan dengan terjadinya reorganisasi Kementerian/Lembaga, maka untuk memastikan keberlanjutan implementasi NSPK Manajemen ASN di instansi sebelum terjadinya reorganisasi, kami menghimbau agar praktik baik yang telah dilaksanakan perlu dijadikan sebagai baseline untuk meningkatkan kualitas implementasi di Kementerian/Lembaga baru dengan memastikan terjadinya kesinambungan produk regulasi, manajemen implementasi, sistem dan prosedur kerja, serta aspek manajemen implementasi lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

 Haryono Dwi Putranto



Tembusan:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BKN; dan
2. Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, dan IV.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Lampiran IK. 7



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/213/RB.06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tahun 2024

25 April 2025

Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran "Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif" serta "Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional". Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 adalah **91,70** dengan kategori "**A-**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	80,04	84,78
B	RB Tematik	10	5,36	6,92
C	Indeks RB	110	85,40	91,70
			A-	A-

Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Catatan :

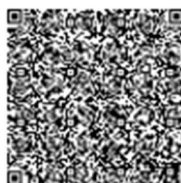
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250422MYGV



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Kelautan dan Perikanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250422MYGV



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 88/SJ.3/OT.320/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Lampiran : -
Hal : Capaian Indikator Kinerja Mandatory Persentase Penyelesaian Proses
Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur Unit
Organisasi Eselon I Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro Perencanaan, Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025, tanggal 18 Desember 2025, hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Mandatory Persentase Penyelesaian Proses Bisnis (Probis) Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi Eselon I	Persentase Capaian
1.	Sekretariat Jenderal	65%
2.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	65%
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	65%
4.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	65%
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	65%
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	65%
7.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	70%
8.	Inspektorat Jenderal	65%
9.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	65%
10.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	65%

Memperhatikan target tahun 2025 adalah 65% (enam puluh lima persen), maka capaian seluruh unit organisasi eselon I di lingkungan KKP telah **memenuhi target kinerja**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran IK. 9



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R.490/MEN-KP/IV/2025 Jakarta, 23 April 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Yth. Presiden Republik Indonesia
Melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
di Jakarta

Dasar:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; dan
3. Pedoman Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau Pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan yang diberikan dari Tim Penilai Internal Menteri Kelautan dan Perikanan, kami mengusulkan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya atas nama Ujang Komarudin Asdani Kartamiharja dan kawan-kawan sebanyak 1.569 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun = 90 orang
2. Satyalancana Karya Satya XX Tahun = 797 orang
3. Satyalancana Karya Satya X Tahun = 682 orang

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Presiden Republik dapat mempertimbangkan usulan dimaksud untuk dapat dianugerahi pada rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025.

Demikian atas perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Tembusan:

1. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Militer Presiden.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



HASIL PENILAIAN INDEKS BerAKHLAK 2024

Nama Instansi Pemerintah: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK:

78.7% (Sehat)

Tabel 1. Perhitungan Indeks BerAKHLAK

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	75.7%	60.6%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	29/32	18.1%
Indeks BerAKHLAK				78.7%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%

Tabel 2. Kategori Indeks BerAKHLAK

Predikat	Kategori	Range Indeks	Deskripsi
A	Sehat	75% - 100%	Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut
B	Cukup Sehat	50% - 74,9%	Pegawai sudah mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik
C	Tidak Sehat	25% - 49,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari
D	Sangat Tidak Sehat	0% - 24,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari

Lampiran IK. 12
Persentase Rekomendasi JF Daerah

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 107/SJ.3/KP.210/I/2026

Yth. : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Dari : Ketua Tim Kerja Asesmen dan Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Jabatan, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Lampiran : Link dokumen
Hal : Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Pemerintah Daerah Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2026

Sehubungan dengan penugasan yang Bapak berikan kepada Tim Kerja Asesmen dan Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Jabatan, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. surat usulan dari pemerintah daerah yang masuk sejumlah 54 (lima puluh empat) surat;
2. dari 54 (lima puluh empat) surat usulan tersebut, 53 (lima puluh tiga) usulan sudah dilakukan verifikasi dan validasi serta diberikan rekomendasi; dan
3. untuk 1 (satu) usulan yaitu dari provinsi Jawa Timur belum dilakukan verifikasi dan validasi serta diberikan rekomendasi karena salah satu unit pembina Jabatan Fungsional tidak berkenan melakukan verifikasi dan validasi serta memberikan rekomendasi.

Memperhatikan target tahun 2025 sebesar 82% (delapan puluh dua persen), maka Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Pemerintah Daerah telah memenuhi target kinerja.

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Pemerintah Daerah pada tautan <https://bit.ly/DashboardRekomendasiJFKP>.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alfin Masruri

Tembusan:
Kepala Subbagian Tata Usaha

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 2131/SJ.3/KI.120/XII/2025

Yth. : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Survei Kepuasan Pelayanan SDMA dan Organisasi (indeks)
Tanggal : 12 Desember 2025

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait pelayanan aparatur terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Biro SDMAO pada tanggal 10 Desember 2025, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan SDMA dan Organisasi (indeks).

Survei tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang objektif mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan. Pengukuran dilakukan terhadap sembilan indikator pelayanan, yaitu:

1. Kemudahan prosedur pelayanan
2. Kesesuaian persyaratan pelayanan
3. Kecepatan pelayanan
4. Kompetensi petugas
5. Perilaku petugas dalam pelayanan
6. Kualitas sarana dan prasarana
7. Kewajaran biaya/tarif
8. Kesesuaian produk pelayanan
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data responden dari unit Eselon I dan UPT, secara umum pelayanan kepegawaian berada pada kategori "Sangat Baik", dengan rekapitulasi hasil IK sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerja sama dan dukungan Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL setien@kkp.go.id

Nomor : B.937/SJ/RC.610/IX/2025 16 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025

Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP serta hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal sebagaimana surat Inspektur Jenderal Nomor T.248/ITJ.1/HP.440/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025 pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMAO), sebagaimana uraian berikut:

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong unit organisasi untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi AKIP.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro SDMAO Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 87 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang mendapatkan nilai sebesar 82,20. Rincian hasil evaluasi AKIP sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,80	22,20	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,00	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,80	13,50	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	22,50	22,50
Nilai Hasil Evaluasi Predikat Penilaian		100	84,70 A (Memuaskan)	82,20 A (Memuaskan)	87,00 A (Memuaskan)

Keterangan :

- a. Tahun 2023 berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023.
- b. Tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 6.1258/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2024.
- c. Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian mandiri AKIP Lingkup Sekretariat Jenderal melalui aplikasi kinerjaaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil penilaian terhadap komponen kinerja sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi portal. Indikator kinerja yang ditetapkan telah dilakukan proses *cascading* dari level atas sampai dengan level di bawahnya.
- 2) Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), dan realistis.
- 3) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, terlihat pada rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam mendukung kinerja. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala.
- 4) Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan validasi perencanaan kinerja untuk memastikan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*), sesuai manual indikator kinerja dan dilengkapi dengan data dukung yang valid.
- 2) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 106,94 yang dihitung dari pencapaian 18 indikator kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2025 NKO sebesar 117,65 yang dihitung dari pencapaian 1 indikator kinerja yang dapat diukur pada Triwulan I.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tepat waktu.
- 2) Substansi Laporan Kinerja telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
 - c) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk Laporan Kinerja Tahunan.
 - d) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

d. Evaluasi Internal

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- penilaian mandiri sesuai Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal, menggunakan aplikasi kinerjaku dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi AKIP dengan melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2024.
 - 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Catatan hasil penilaian mandiri atas evaluasi AKIP Tahun 2024 telah ditindaklanjuti melalui Memorandum Kepala Biro SDMAO Nomor 1395/SJ.3/TU.210/VII/2025 hal Tindak Lanjut atas Rekomendasi SAKIP Biro SDMAO tanggal 26 Agustus 2025.
 5. Dalam rangka meningkatkan AKIP di Biro SDMAO, direkomendasikan kepada Saudara agar melakukan upaya antara lain:
 - a. Meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dari Tahun 2024.
 - b. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur.
 - c. Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur I

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 8/SJ.3/TU.210/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026
Tanggal : 04 Januari 2026

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP di Portal Pegawai yang berbasis data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)/MyASN tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

1. **Capaian IKU IP ASN** di lingkungan **KKP** Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, sebesar **86,03** (kategori **Tinggi**) terdiri dari kualifikasi 22,63, kompetensi 32,88, kinerja 25,53, dan disiplin 4,99. Target sebesar **82** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **104,91%** (melebihi target), terlampir nilai detail pada lampiran;
2. **Capaian IKU IP ASN** di lingkup **Sekretariat Jenderal** Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, sebesar **88,37** (kategori **Tinggi**) terdiri dari kualifikasi 22,71, kompetensi 34,47, kinerja 26,18; dan disiplin 5. Target sebesar **82** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **107,7%** (melebihi target), terlampir nilai detail pada lampiran;
3. Analisis dan Rekomendasi atas Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga **BKN sudah tidak**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dikarenakan penerapan **Manajemen Talenta** dimana adanya penggabungan IP ASN dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini menjadikan IKU IP ASN di Lingkungan KKP tidak dapat menjadi Output Kendali Rendah karena penilaian IP ASN secara mandiri di KKP, tetapi sumber database pengukuran IP ASN KKP tetap dari database Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan MyASN;

- b. IP ASN memiliki 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), dan Disiplin (bobot 5), dari ke empat dimensi terdapat unsur yang sangat memegang peran penting yaitu Penilaian Kinerja/SKP, karena **predikat SKP** akhir periode (tahun sebelumnya) **dihitung 2 (dua)** kali, pada dimensi Kinerja (bobot 30) dan pada dimensi Kompetensi, predikat SKP mendapatkan bobot 25, sehingga apabila seorang ASN mendapatkan predikat SKP Sangat Baik, IP ASN sudah mendapatkan nilai 55. Hal ini menjadi rekomendasi agar para pengelola SKP, pengelola data pegawai atau IP ASN, sebagai berikut:
 - 1) selalu monitoring nilai predikat SKP seluruh pegawainya, apakah **predikat SKP** di aplikasi eKinerja BKN sudah **sinkronisasi** ke aplikasi **SIASN BKN**;
 - 2) input data **riwayat kinerja** di aplikasi SIASN apabila terdapat pegawai **pindahan** dari luar KKP yang belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN;
 - 3) bagi pegawai yang tidak menyusun perencanaan SKP, tidak mengisi rencana aksi, mengisi bukti dukung, mengisi realisasi dan dinilai SKP nya oleh Pimpinan Organisasi **wajib** di monitoring dan dilakukan penilaian SKP untuk menghindari adanya disparitas data kinerja pada aplikasi SIASN.
- c. Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25 dengan melihat level jabatan (struktural, Fungsional Ahli dan Terampil, dan pelaksana) yang memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya monitoring dari pengelola data SIASN untuk verifikasi data jabatan terakhir dan data riwayat pendidikan, saat ini seluruh ASN di lingkungan KKP dapat melihat kondisi data profile pribadi dan data riwayat pribadinya serta kelengkapan data dokumen elektroniknya pada **Portal Pegawai** di aplikasi Portal KKP

4. Upaya Optimalisasi dan menghindari *trafik* sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2026, Saudara dapat menugaskan pengelola data kepegawaian, sebagai berikut:
- a. monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya pada **awal triwulan IV 2026** untuk mengupdate data pendidikan dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil serta diklat teknis dan diklat 20 JP bagi PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK,
 - b. melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada **aplikasi i-dis BKN** di lingkungan KKP;
 - c. melakukan **pendataan** dan melaporkan ke kami, siapa saja ASN yang **tidak memiliki predikat SKP** tahun 2025;
 - d. updating data **pencantuman gelar** bagi ASN yang sudah memiliki ijazah pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIASN.

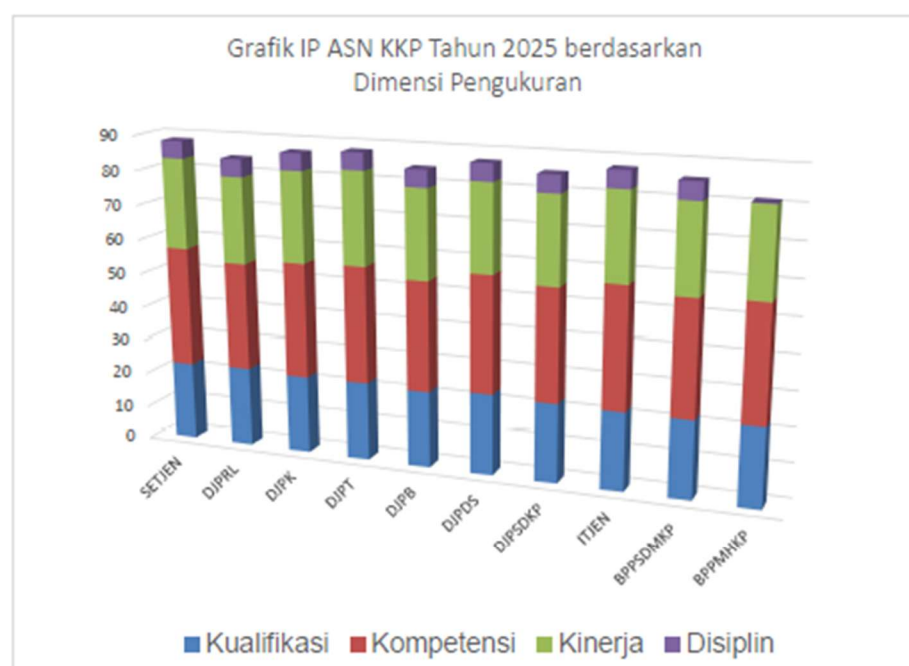
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



3. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
11	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
	Total	21,71	34,47	26,18	5	88,37 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 547 ASN lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK 2025. Data terakhir diambil pada tanggal 31 Desember 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 50/SJ.4/TU.210/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lampiran : -

Dari : Kepala Biro Hukum

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 6 Januari 2026

Sehubungan dengan penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 2025 (Juni sampai dengan Desember), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
2. capaian indikator kinerja persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025;
3. capaian target program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Tahun 2025 sesuai dengan target kinerja dihitung sebagai berikut:

RANCANGAN PERMEN-KP			RANCANGAN KEPMEN-KP		
No.	Tahapan	Capaian (%)	No	Tahapan	Capaian (%)
1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20	1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20
2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35	2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35
3.	Permohonan masukan/tanggapan	50	3.	Permohonan masukan/ tanggapan kepada unit organisasi terkait	50

	kepada unit organisasi terkait				
4.	Pembahasan rancangan	75	4.	Pembahasan rancangan	70
5.	Permohonan harmonisasi rancangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	5.	Permohonan paraf persetujuan pimpinan unit organisasi terkait	85
			6.	Penetapan Menteri	100

4. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 terdapat 30 (tiga puluh) rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
- 18 (delapan belas) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 - 12 (duabelas) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan,
- dimana sampai dengan semester II seluruh rancangan peraturan perundang-undangan telah selesai sebesar **100% (seratus persen)**, dengan **realisasi** sebagai berikut:

Unit Kerja	PERMEN-KP		KEPMEN-KP	
	DIUSULKAN	SELESAI	DIUSULKAN	SELESAI
DITJEN PK	2	2	2	2
DITJEN PT	1	1	2	2
DITJEN PB	2	2	-	-
DITJEN PDSPKP	2	2	-	-
DITJEN PSDKP	-	-	1	1
ITJEN	-	-	-	-
BPPSDMKP	3	3	1	1
BPPMHKP	3	3	-	-
ROREN	2	2	2	2
ROKEU-BMN	-	-	1	1
ROSDMAO	2	2	-	-
ROKUM	-	-	1	1
ROHKLN	-	-	1	1
ROUM-PBJ	1	1	-	-
PUSDATIN	-	-	1	1
TOTAL	18	18	12	12
SUBTOTAL	Dari 30 Usulan Rancangan, 30 Rancangan Telah Selesai			

5. adapun rincian penilaian hasil capaian indikator kinerja persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan semester II tahun 2025, sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Target Semester II		Capaian Semester II	
		Per/Kep	Persentase	Per/Kep	Persentase
1.	DITJEN PK	4	100%	4	100%
2.	DITJEN PT	3	100%	3	100%
3.	DITJEN PB	2	100%	2	100%
4.	DITJEN PDSPKP	2	100%	2	100%
5.	DITJEN PSDKP	1	100%	1	100%
6.	ITJEN	-	-	-	-
7.	BPPSDMKP	4	100%	4	100%
8.	BPPMHKP	3	100%	3	100%
9.	ROREN	2	100%	2	100%
10.	ROKEU-BMN	1	100%	1	100%
11.	ROSDMAO	2	100%	2	100%
12.	ROKUM	1	100%	1	100%
13.	ROHKLN	1	100%	1	100%
14.	ROUM-PBJ	1	100%	1	100%
15.	PUSDATIN	1	100%	1	100%

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, **Biro Hukum** berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan dengan semangat **#BerbahagiaMelayani** dan **#BerkinerjaSepenuhHati**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 60/ITJ.O/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Para Sekretaris Ditjen Lingkup KKP
3. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025" dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup KKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Tahun 2025 sebesar 93,24% (tuntas 2042 dari 2190 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I lingkup KKP sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

- Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
 4. Para Kepala Badan lingkup KKP

Lampiran
 Nomor : 136/SJ.2/RC.610/I/2026
 Tanggal : 12 Januari 2026

**Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup
 Sekretariat Jenderal**

No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Pusdatin	-	-	-	100
7	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	0	100
8	BPISDKP	-	-	-	100
9	TP	-	-	-	100
Total		1.885.275.241	1.885.275.241	0	100



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 103/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro
2. Para Kepala Pusat
3. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP
4. Kepala BPISDKP

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV
Tahun 2025

Tanggal : 9 Januari 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" periode Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh sebesar 100% yaitu dari 89 rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 89 rekomendasi.
2. Pencapaian ini diperoleh berdasarkan Surat Dinas Inspektur Jenderal Nomor B.272/ITJ/HP.550/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 Hal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Periode s.d. Triwulan IV TA 2025 Lingkup Sekretariat Jenderal KKP sebagaimana Surat Dinas Nomor B.272/ITJ/HP.550/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2025.
3. Capaian IKU dari masing-masing unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Lampiran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Untuk pelaporan melalui aplikasi Kinerjaku maupun dokumen Laporan Kinerja (LKJ), apabila tidak ada rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti maka capaian Indikator dilaporkan sesuai target yaitu 100%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 103/SJ.2/RC.610/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Biro HKLN	0	0	100%	0	0%
7	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
8	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
9	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
Total		89	89	100%	0	0



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 2105/SJ.3/RC.420/XIV/2025

Yth : 1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Biro Perencanaan
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran (POK)
Tanggal : 10 Desember 2025

Bersama ini terlampir kami sampaikan Usulan Revisi Anggaran (POK) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi pada Layanan Umum (2328.EBA.962), dan Layanan Perkantoran (2328.EBA.994). Mohon berkenan Usulan Revisi kami dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Danlarsyah